KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 104/KEP/B1/2019
TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta perubahan kewenangan pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Perjanjian Kinerja Program

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERJANJIAN KINERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PK Program KKBPK 2020 adalah dokumen perjanjian kinerja yang dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

KEDUA : Pihak yang menyusun PK Program KKBPK 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
b. Unit Kerja Eselon I BKKBN;
c. Unit Kerja Eselon II di lingkungan BKKBN; dan
d. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : PK Program KKBPK 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan mitra kerja terkait lainnya.

KELIMA : Dalam pelaksanaan Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, BKKBN melakukan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi dalam tercapainya sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pihak yang menyusun PK Program KKBPK 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan kinerja kepada Kepala BKKBN setiap

bulannya sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

KETUJUH : Laporan hasil pelaksanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, sebagai evaluasi capaian PK Program KKBPK 2020 pada forum Rapat Pengendalian Program yang dilaksanakan setiap bulan.

KEDELAPAN : Hasil evaluasi capaian PK Program KKBPK 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH digunakan sebagai masukan percepatan pencapaian kinerja serta penentuan penghargaan dan hukuman dalam pelaksanaan Program KKBPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 10 Desember 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 104/KEP/B1/2019
TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN
2020

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasto Wardoyo**
Jabatan : **Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Semarang, 12 Desember 2019
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.
Kepala,

Hasto Wardoyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.26
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61.78
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	8.6
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25 Kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	5	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	53.57 (skala 0 - 100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21.9 tahun

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	1.005.213.984.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.504.855.038.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	11.378.121.000
4	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	60.106.917.000
	Total Anggaran	**Rp 3.581.554.060.000**

Semarang, 12 Desember 2019
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,

M. Yani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi *(Unmet Need)*	8,6
2	Terwujudnya keluarga berkualitas	2	Indeks Pembangunan Keluarga	53.57 (Skala 0-100)
3	Terwujudnya pertumbuhan penduduk seimbang	3	*Total Fertility Rate* (TFR)	2.26
4	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	4	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1-4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapainya sasaran Program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas	5	Indeks pemahaman masyarakat tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	46 (Skala 0-100)
		6	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO)	25,8
2	Terwujudnya sistem informasi keluarga yang terintegrasi	7	Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	55.04 (Skala 0-100)
3	Tercapainya pengembangan transformasi digital untuk peningkatan kapabilitas strategis organisasi	8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.3 (Skala 1-5)
		9	Jumlah aplikasi *smart* program KKBPK	1 Aplikasi
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	11	*Culture fit index* individu	3 (Skala 1-4)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Advokasi, Penggerakan dan Informasi dan Direktorat Advokasi dan KIE	93
		13	Opini atas laporan keuangan dari BPK	WTP
		14	Persentase penyerapan anggaran Satker Advokasi, Penggerakan dan Informasi dan Direktorat Advokasi dan KIE	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	15	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	71
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	16	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	34.473.400.000
2	Peningkatan kemitraan dengan *stakeholder* dan mitra kerja	1.707.380.000
3	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	3.152.500.000
4	Penyediaan data dan informasi program KKBPK	5.281.400.000
5	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program KKBPK	41.857.000.000
Total Anggaran		**Rp 86.471.680.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

M. Yani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Hasto Wardoyo	**Dwi Listyawardani**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25
2	Terwujudnya keluarga berkualitas	2	Indeks Pembangunan Keluarga	53.57 (Skala 0-100)
3	Terwujudnya pertumbuhan penduduk seimbang	3	Total Fertility Rate (TFR)	2.26
4	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	4	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1-4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengendalian Penduduk	5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	53 (Skala 1-100)
		6	Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan	51,8 (Skala 0-100)
		7	Persentase Kampung KB mandiri	10
		8	Persentase Pemda yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	30% Provinsi dan 21% kab/kota
2	Meningkatnya literasi kependudukan secara optimal	9	Persentase balai diklat daerah yang menyelenggarakan pendidikan kependudukan jalur nonformal kepada SDM pengelola program pengendalian penduduk	2
3	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengendalian penduduk	10	Persentase pemerintah daerah yang menyediakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	30% Provinsi dan 10% kab/kota
4	Menguatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	11	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	30% Provinsi dan 21% kab/kota
		12	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk terhadap Jumlah Kampung KB	50
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	13	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	14	*Culture fit index* individu	3 (Skala 1-4)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Pengendalian Penduduk	93
		16	Opini atas laporan keuangan dari BPK	WTP
		17	Persentase penyerapan anggaran Satker Pengendalian Penduduk	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	18	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk	71
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	19	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan Pengendalian Penduduk	1.828.040.000
2	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	2.134.490.000
3	Kerjasama Pendidikan kependudukan	2.092.080.000
4	Analisis Dampak Kependudukan	2.208.000.000
Total Anggaran		**Rp 8.262.610.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Penduduk,

Dwi Listyawardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sukiswo
Jabatan : Inspektur Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,

Agus Sukiswo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT UTAMA

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	1
		2	Persentase pemenuhan Sertifikasi ISO 37001 (anti suap)	43% (Persiapan dan internalisasi ISO 37001)
2	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	3	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1 – 4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK	4	Persentase materialitas temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN	0.09
2	Terwujudnya pelaksanaan audit internal berbasis risiko yang berkualitas	5	Persentase materialitas temuan internal terhadap anggaran Satker	0.08
3	Terwujudnya Pemenuhan SDM Irtama yang Kompeten	6	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level Kapabilitas APIP 3 (dengan 1 elemen telah level 4)
4	Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat yang efektif	7	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
5	Tercapainya ketersediaan data hasil pengawasan yang akurat	8	Persentase pelaporan hasil pengawasan tepat waktu	100
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	11	*Culture fit index* individu	3.0 (Skala 1 – 4)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	12	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Inspektorat Utama	71
4	Terwujudnya pemanfaatan anggaran yg akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Satker Inspektorat Utama	93
		14	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKKBN	WTP
		15	Persentase penyerapan anggaran Satker Inspektorat Utama	≥ 95%
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	16	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Utama	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah I	2.757.650.000,00
2	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah II	2.852.000.000,00
3	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah III	2.840.400.000,00
Total Anggaran		**Rp 8.450.050.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019
Inspektur Utama,

Agus Sukiswo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,

Dwi Listyawardani

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)	61.78
2	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	2	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	8.60
3	Menurunnya angka kelahiran remaja	3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25
4	Terwujudnya keluarga berkualitas	4	Indeks Pembangunan Keluarga	53.57 (Skala 0-100)
5	Terwujudnya pertumbuhan penduduk seimbang	5	Total Fertility Rate (TFR)	2.26
6	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	6	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1-4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.11
2	Meningkatnya pembinaan fasilitas kesehatan dalam layanan KB	8	Persentase faskes yang siap melayani KB/ MKJP	38.32
3	Tercapainya kualitas pelayanan KB yang optimal	9	Indeks Kualitas Pelayanan KB	77.5 (Skala 0 – 100)
4	Meningkatnya kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	10	Persentase kesertaan KB di 100 kab/kota dengan tingkat kesertaan terendah	37.96
5	Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi	11	Indeks pengetahuan sikap dan perilaku kesehatan reproduksi PUS	47 (Skala 0 – 100)
		12	Indeks pengetahuan sikap dan perilaku kesehatan reproduksi Remaja	59 (Skala 0 – 100)
		13	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	29
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	14	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	15	*Culture fit index* individu	3 (Skala 1-4)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	93
		17	Opini atas laporan keuangan dari BPK	WTP
		18	Persentase penyerapan anggaran Satker Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	≥ 95
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	19	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	71
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	20	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	32.406.122.000
2	Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	1.899.100.000
3	Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	2.232.014.000
4	Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi	1.971.512.000
Total Anggaran		**Rp 38.508.748.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019
Deputi Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi,

Dwi Listyawardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Yani**
Jabatan : **Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hasto Wardoyo**
Jabatan : **Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,

M. Yani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	53.57 (Skala 0-100)
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21.9 tahun
2	Terwujudnya pertumbuhan penduduk seimbang	3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.26
3	Menurunnya angka kelahiran remaja	4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
4	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	5	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1 – 4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya kesiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	6	Indeks kesiapan berkeluarga	65.6 (Skala 0-100)
2	Meningkatnya kemandirian lansia dan kesejahteraan keluarga	7	Persentase lansia tangguh	12
3	Meningkatnya karakter melalui pola asuh dalam keluarga	8	Persentase penguatan karakter melalui pengasuhan dalam keluarga Balita dan Anak	43.41
		9	Persentase pembangunan karakter melalui pengasuhan dalam keluarga Remaja	71.73
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	11	*Culture fit index* individu	3 (Skala 1 – 4)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran yg akuntabel	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Satker Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	93
		13	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKKBN	WTP
		14	Persentase penyerapan anggaran Satker Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	15	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	71
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	16	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	2.324.219.000
2	Pembinaan Ketahanan Remaja	10.975.000.000
3	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2.058.800.000
4	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3.133.583.000
Total Anggaran		**Rp 18.491.602.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga,

M. Yani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Rizal Martua Damanik**
Jabatan : **Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hasto Wardoyo**
Jabatan : **Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,

Muhammad Rizal Martua Damanik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Terwujudnya keluarga berkualitas	1	Indeks Pembangunan Keluarga	53.57 (Skala 0-100)
2	Terwujudnya pertumbuhan penduduk seimbang	2	*Total Fertility Rate* (TFR)	2.26
3	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	3	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1-4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program KKBPK, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	4	Persentase SDM Aparatur yang kompeten	22
		5	Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik	70
		6	Persentase kerjasama internasional KKBPK yang diimplementasikan	70
		7	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan Program KKBPK	75
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	8	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	9	*Culture fit index* individu	3 (Skala 1-4)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Latbang dan Litbang	93
		11	Opini atas laporan keuangan dari BPK	WTP
		12	Persentase penyerapan anggaran Satker Latbang dan Litbang	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	13	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	71
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	14	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.105.040.000
2	Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Internasional bidang Kependudukan dan KB	5.884.991.000
3	Peningkatan penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3.029.619.000
4	Peningkatan penelitian dan pengembangan Kependudukan	4.762.211.000
Total Anggaran		**Rp 19.781.861.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,

Muhammad Rizal Martua Damanik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,

Nofrijal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN STRATEGIS**			
1	Meningkatnya *public branding* atas reputasi layanan BKKBN	1	Indeks persepsi publik terhadap layanan KKBPK BKKBN	3 (Skala 1-4)
2	Tercapainya kualitas layanan kesekretariatan yang Unggul	2	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	3.3 (Skala 1-4)
B.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang berkualitas di lingkungan BKKBN	3	Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program KKBPK	3.1 (Skala 1-5)
2	Terwujudnya dukungan manajemen dalam penyelenggaraan program KKBPK yang berkualitas	4	Indeks Reformasi Birokrasi BKKBN	76 (Skala 0-100)
		5	Opini atas laporan keuangan dari BPK	WTP
		6	Tingkat maturitas SPIP BKKBN	3.4 (Skala 1-5)
		7	Indeks Sistem Merit	3 (Skala 1-4)
3	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	8	*Culture fit index* individu BKKBN	3 (Skala 1-4)
4	Meningkatnya akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	9	Nilai akuntabilitas (SAKIP) BKKBN	71
		10	Nilai tata kelola organisasi BKKBN	72
5	Tercapainya pemenuhan SDM Settama yang kompeten	11	Persentase SDM Settama yang memenuhi standar kompetensi	70
6	Meningkatnya inter-operabilitas sistem informasi digital kesekretariatan	12	Persentase sistem informasi kesekretariatan yang terintegrasi	70
7	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKKBN	93
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	14	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja	23 (Skala 0-23.5)
2	Terwujudnya *high-performance culture* berbasis merit	15	*Culture fit index* individu	3 (Skala 1-4)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Sekretariat Utama	93
		17	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Utama	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	18	Nilai akuntabilitas (SAKIP) Sekretariat Utama	71
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	19	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Utama	3.4 (Level 1-5)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan sinkronisasi Landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana	3.008.788.000
2	Pengelolaan Keuangan dan BMN	8.189.000.000
3	Penguatan perencanaan Program dan Anggaran	5.028.250.000
4	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	3.922.910.000
5	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang cepat dan tepat (termasuk Gaji, Uang Makan dan Remunerasi, serta cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran)	118.319.893.000
Total Anggaran		**Rp 138.468.841.000**

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo

Semarang, 12 Desember 2019
Sekretaris Utama,

Nofrijal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komari
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Nofrijal

Pihak Pertama,

Komari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUMAS

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Indeks Reformasi Birokrasi BKKBN	76 (Skala 1-100)
2	Meningkatnya akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	2	Nilai tata kelola organisasi	72
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Terwujudnya Landasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK	3	Persentase regulasi yang mendukung dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program KKBPK	80% dari Program Legislasi Kepala BKKBN
		4	Indeks kepuasan pelayanan publik (konsultasi, data dan informasi)	3 (Skala 1-4)
		5	Nilai efektivitas kelembagaan	68
		6	Persentase pemberitaan positif terhadap BKKBN	80
		7	Persentase pemberitaan remaja di media massa	80
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	9	Tingkat maturitas SPIP	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	10	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	11	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Penyediaan dan sinkronisasi Landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana	1	Koordinasi penyusunan produk hukum	661.933.000
	2	Hubungan masyarakat	692.022.000
	3	Pengelolaan kelembagaan	1.203.515.000
	4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	451.318.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 3.008.788.000**

Sekretaris Utama,

Nofrijal

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat,

Komari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Rustam
Jabatan : Plt. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Nofrijal

Pihak Pertama,

Lalu Rustam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BMN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	1	Tingkat maturitas SPIP BKKBN	3.4 (skala 1-4)
2	Terwujudnya pemanfaatan anggaran yang akuntabel	2	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKKBN	WTP
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang berkualitas	3	Persentase satker yang menyusun Laporan Keuangan (LK) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	92
		4	Persentase satker yang memperoleh nilai IKPA lebih besar dari 90	92.5
		5	Persentase BMN satker yang sudah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP)	25
2	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan	6	Persentase satker yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa yang sesuai peraturan	91
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	8	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	9	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	10	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	1	Penyusunan Laporan Keuangan	277.000.000
	2	Pengelolaan Perbendaharaan	440.500.000
	3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	3.312.500.000
	4	Penatausahaan BMN	286.000.000
	5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2.219.000.000
	6	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.654.000.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 8.189.000.000**

Sekretaris Utama,

Nofrijal

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN,

Lalu Rustam

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djusni Meirida
Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Nofrijal

Pihak Pertama,

Djusni Meirida

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO KEPEGAWAIAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapaianya *high-performance culture* berbasis merit	1	*Culture fit index*	3 (Level 1-4)
2	Meningkatnya Pengelolaan SDM yang profesional	2	Indeks sistem merit institusi	3 (Level 1-4)
3	Tercapainya pemenuhan SDM Sestama yang kompeten	3	Persentase SDM Sestama yang memenuhi standar kompetensi	70
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)	4	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian BKKBN	4 (Skala 1-5)
		5	Persentase penerapan manajemen pengembangan talenta pegawai BKKBN (management talent)	60
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	7	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	8	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	9	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	Administrasi Kepegawaian	1.167.066.000
	2	Penempatan/Mutasi Pegawai	733.585.000
	3	Pengembangan Pegawai	833.618.000
	4	Pembinaan Pegawai	600.205.000
	5	Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi ASN	588.436.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 3.922.910.000**

Sekretaris Utama,

Nofrijal

Semarang, 12 Desember 2019
Kepala Biro Kepegawaian,

Djusni Meirida

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fathonah
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Nofrijal

Pihak Pertama,

Siti Fathonah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO PERENCANAAN

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	1	Nilai akuntabilitas (SAKIP) BKKBN	71
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	3	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	4	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	5	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	6	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN	KOMPONEN		ANGGARAN (Rp)
Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran	1	Penyusunan Rencana Kerja	4.022.600.000
	2	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.005.650.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 5.028.250.000**

Sekretaris Utama,

Nofrijal

Semarang, 12 Desember 2019
Kepala Biro Perencanaan,

Siti Fathonah

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fathonah
Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Nofrijal

Pihak Pertama,

Siti Fathonah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO UMUM

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya *inter-operabilitas* sistem informasi digital kesekretariatan	1	Persentase sistem informasi kesekretariatan yang terintegrasi	70
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran pengelolaan sarana prasarana perkantoran (komposit + kehumasan)	2	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran (komposit + kehumasan)	3.30 (Skala 1-4)
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	3	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	4	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	5	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	6	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat	1	Layanan Umum Rumah Tangga	584.400.000
	2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1.137.525.000
	3	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	574.148.000
	4	Pengelolaan Arsip dan Persuratan	275.778.000
	5	Pelaksanaan keprotokoleran	315.201.000
	6	Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	87.231.044.000
	7	Peningkatan Cakupan penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	18.455.141.000
	8	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	5.719.380.000
	9	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	800.000.000
	10	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	3.227.276.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 118.319.893.000**

Sekretaris Utama,

Nofrijal

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Kepala Biro Umum,

Siti Rathonah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komari
Jabatan : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Dwi Listyawardani

Pihak Pertama,

Komari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.11
B.	**SASARAN KEGIATAN / PRIORITAS NASIONAL**			
1	Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB	2	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	38.32
2	Terpenuhinya ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan	3	Jumlah ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan	529 faskes (DKI Jakarta)
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	1	Penguatan Kebijakan dan Strategi Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah yang Terintegrasi dengan BPJS Kesehatan	499.380.000
	2	Penguatan Penggerakan dan Pelayanan KB	260.024.000
	3	Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB di Faskes Pemerintah	684.512.000
	4	Jaminan Ketersediaan Alokon (buffer)	29.450.021.000
	5	Penguatan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kesertaan KB	140.320.000
	6	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kesertaan KB Jalur	773.820.000
Proyek Prioritas Nasional	7	Jaminan Ketersediaan Alokon (Provinsi DKI Jakarta)	598.045.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 32.406.122.000**

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

Dwi Listyawardani

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah,

Komari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nerius Auparai
Jabatan : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Dwi Listyawardani

Pihak Pertama,

Nerius Auparai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	8.60
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus	2	Persentase kesertaan KB di 100 kab/kota dengan kesertaan rendah	37.96
		3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	74.73
		4	Persentase kesertaaan KB Pria	4.93
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	5	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	6	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	7	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	8	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin, DTPK dan sasaran khusus (KB Pria)	270.410.000
	2	Fasilitasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan DTPK	467.110.000
	3	Peningkatan Peran Mitra Kerja dalam Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan Daerah Tertinggal (termasuk DTPK)	729.571.000
	4	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB Pria	267.067.000
	5	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)	497.856.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 2.232.014.000**

Semarang, 12 Desember 2019

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

Dwi Listyawardani

Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus,

Nerius Auparai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widwiono
Jabatan : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dwi Listyawardani	**Widwiono**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR SWASTA

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	61.78
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	2	Indeks Kualitas Pelayanan KB (termasuk Method Information Index/MII)	77.5 (Skala 0-100)
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	3	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	4	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	5	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	6	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR	1	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pelayanan KB Jalur Swasta	650.411.000
	2	Peningkatan Kapasitas SDM, serta Ketersediaan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Berkualitas di Faskes Swasta dan Jejaringnya	289.435.000
	3	Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pelayanan KB Jalur Swasta	579.434.000
	4	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta	379.820.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 1.899.100.000**

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

Dwi Listyawardani

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta,

Widwiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widwiono
Jabatan : Plt. Direktur Kesehatan Reproduksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Dwi Listyawardani

Pihak Pertama,

Widwiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KESEHATAN REPRODUKSI

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate* /ASFR 15-19 tahun)	25
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	2	Indeks Pengetahuan, sikap dan perilaku Kesehatan Reproduksi PUS	47.0 (Skala 0-100)
		3	Indeks Pengetahuan, sikap dan perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja	59.0 (Skala 0-100)
		4	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	5	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	6	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	7	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	8	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	1	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang Dikembangkan	276.097.000
	2	Penyediaan Sarana dan distribusi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	20.000.000
	3	Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes	609.905.000
	4	Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi di DTPK	246.439.000
	5	Peningkatan Kesertaan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	74.280.000
	6	Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi (di komunitas, mitra kerja, serta bagi PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD)	426.899.000
	7	Penyediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan	20.000.000
	8	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	297.892.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 1.971.512.000**

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Direktur Kesehatan Reproduksi,

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Evi Ratnawati
Jabatan : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Maria Evi Ratnawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam pembentukan karakter	38.68
B.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	2	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	3	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	4	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	1	Promosi Pembinaan Keluarga BKB	755.372.000
	2	Penguatan Jejaring Kemitraan BKB	406.738.000
	3	Peningkatan Kualitas pembinaan kelompok BKB HI	697.265.000
	4	Monitoring dan Evaluasi Program Bina Keluarga Balita	464.844.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 2.324.219.000**

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan dan Pemberdayaan Keluarga,

M. Yani

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak,

Maria Evi Ratnawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widati
Jabatan : Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Widati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
A.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya kemandirian lansia dan kesejahteraan keluarga	1	Persentase lansia tangguh	12
2	Meningkatnya pemberdayaan keluarga rentan	2	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	55.000
B.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	3	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	4	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	5	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	6	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	1	Promosi Pembinaan dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	535.288.000
	2	Peningkatan Jejaring Kemitraan	802.932.000
	3	Peningkatan Kualitas PPKS	411.760.000
	4	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BKL dan PPKS	308.820.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 2.058.800.000**

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan dan Pemberdayaan Keluarga,

M. Yani

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan,

Widati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Sulistia Ediningsih
Jabatan : Direktur Bina Ketahanan Remaja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Eka Sulistia Ediningsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	53.57 (Skala 0 - 100)
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21.9 tahun
2	Meningkatnya akses dan kualitas penyelengaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3	ASFR 15 –19 Tahun	25
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	4	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	72.13 (Skala 0 - 100)
		5	Indeks karakter remaja	66.43 (Skala 0 - 100)
2	Tercapainya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	6	Indeks kesiapan berkeluarga	65.6 (Skala 0 - 100)
3	Penguatan karakter melalui pola asuh dalam keluarga	7	Persentase pembangunan karakter remaja melalui pengasuhan dalam keluarga	71.73
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	9	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	10	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	11	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pembinaan Ketahanan Remaja	1	Penyusunan kebijakan, strategi, pedoman, materi dan administrasi	554.260.000
	2	Penguatan Promosi dan Pelembagaan Program GenRe	9.591.750.000
	3	Peningkatan Akses dan Kualitas PIK R/M	480.240.000
	4	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Program Bina Ketahanan Remaja	348.750.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 10.975.000.000**

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan dan Pemberdayaan Keluarga,

M. Yani

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Bina Ketahanan Remaja,

Eka Sulistia Ediningsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Setiorini
Jabatan : Plt. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Endang Setiorini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
A.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan keluarga	1	Persentase Keluarga yang berwirasusaha	10.70
B.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	2	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	3	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	4	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN	KOMPONEN		ANGGARAN (Rp)
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	Pengembangan kebijakan dan Peningkatan Promosi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	797.603.000
	2	Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kelompok UPPKS	1.465.868.000
	3	Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga	483.395.000
	4	Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	386.717.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 3.133.583.000**

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan dan Pemberdayaan Keluarga,

M. Yani

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga,

Endang Setiorini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hitima Wardhani
Jabatan : Direktur Analisis Dampak Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Dwi Listyawardani

Pihak Pertama,

Hitima Wardhani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengendalian Penduduk	1	Persentase Kampung KB mandiri	10
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Kelembagaan dalam bidang pengendalian penduduk	2	Persentase pemerintah daerah yang menyediakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	30% Provinsi dan 10% kab/kota
		3	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	50
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Analisis Dampak Kependudukan	1	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Dampak Kependudukan (berbasis sektoral, tematik dan spasial)	794.880.000
	2	Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan Kebijakan Dampak Kependudukan	706.560.000
	3	Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	264.960.000
	4	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Dampak Kependudukan	441.600.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 2.208.000.000**

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Dwi Listyawardani

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Analisis Dampak Kependudukan,

Hitima Wardhani

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Taruna Rosevelt**
Jabatan : **Plt. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dwi Listyawardani**
Jabatan : **Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Dwi Listyawardani

Pihak Pertama,

Taruna Rosevelt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PEMADUAN KEBIJAKAN PENDUDUK

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengendalian Penduduk	1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	53 (skala 1 - 100)
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Terwujudnya sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan	2	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	30% Provinsi dan 21% kab/kota
		3	Persentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	10% Provinsi dan 10% kab/kota
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	1	Kebijakan dan strategi grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	683.037.000
	2	Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	170.759.000
	3	Implementasi/pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	341.518.000
	4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan pembangunan daerah	512.278.000
	5	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	426.898.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 2.134.490.000**

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Dwi Listyawardani

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk,

Taruna Rosevelt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufik
Jabatan : Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Dwi Listyawardani

Pihak Pertama,

Ahmad Taufik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengendalian Penduduk	1	Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan	51.8 (Skala 0 - 100)
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas institusi pendidikan kependudukan dalam mendukung bonus demografi	2	Persentase balai diklat daerah yang menyelenggarakan pendidikan kependudukan jalur nonformal kepada SDM pengelola program pengendalian penduduk	2% (34 Provinsi - 514 Kab/Kota)
		3	Persentase institusi pendidikan yang menyelenggarakan kerjasama pendidikan kependudukan dengan kriteria baik dari yang sudah terbentuk	20% (102 SSK)
				20% (68 PTPK)
		4	Persentase poktan pojok kependudukan di Kampung KB Percontohan yang mendapatkan pembinaan tentang kependudukan	10
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	5	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	6	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	7	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	8	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

Keterangan:

*SSK= Sekolah Siaga Kependudukan

**PTPK= Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Kerjasama Pendidikan kependudukan	1	Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan	351.469.000
	2	Penyiapan materi pendidikan kependudukan	518.836.000
	3	Peningkatan dan atau pengembangan kemitraan pendidikan kependudukan	317.996.000
	4	Implementasi pendidikan kependudukan (desiminasi/publikasi)	485.363.000
	5	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan	418.416.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 2.092.080.000**

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Semarang, 12 Desember 2019
Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustakim
Jabatan : Plt.Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dwi Listyawardani	**Mustakim**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengendalian Penduduk	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.26
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	2	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	30% Provinsi dan 21% kab/kota
		3	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk terhadap Jumlah Kampung KB	50
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Perencanaan Pengendalian Penduduk	1	Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk	804.338.000
	2	Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk	292.486.000
	3	Pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan	219.365.000
	4	Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk	146.243.000
	5	Pembinaan, monitoring dan evaluasi program perencanaan pengendalian penduduk	365.608.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 1.828.040.000**

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Dwi Listyawardani

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk

Mustakim

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidin
Jabatan : Plt. Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Wahidin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapainya sasaran Program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi *(Unmet Need)*	8.6
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya komitmen dan peran serta mitra kerja dan pemangku kebijakan di seluruh tingkatan wilayah dalam pengelolaan Program KKBPK	2	Persentase *stakeholders* /pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	50
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	3	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	4	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	5	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	6	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja	1	Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakkan operasional program KKBPK	863.247.000
	2	Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional program KKBPK	241.180.000
	3	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Bina Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan	301.477.000
	4	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah	301.476.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 1.707.380.000**

Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

M. Yani

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga,

Wahidin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidin
Jabatan : Direktur Bina Lini Lapangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Wahidin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapainya sasaran Program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas	1	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO)	25.8
		2	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	8.6
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya Kinerja Penyuluh KB dalam capaian Program KKBPK	3	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	58
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	1	Pengembangan Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja SDM Lini Lapangan dan Mekanisme	467.068.000
	2	Pengembangan Materi dan Sarana Prasarana Operasional Lini Lapangan	249.163.000
	3	Peningkatan Kapasitas SDM Lini Lapangan	443.471.000
	4	Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB	1.204.673.000
	5	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan	788.125.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 3.152.500.000**

Semarang, 12 Desember 2019

Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

M. Yani

Direktur Bina Lini Lapangan,

Wahidin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudy Budiman
Jabatan : Direktur Pelaporan dan Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Rudy Budiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Peningkatan kualitas data dan informasi dalam sistem informasi keluarga program KKBPK di Seluruh Tingkatan Wilayah	1	Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	55.04 (Skala 0-100)
B.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	2	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	3	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	4	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK	1	Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program KKBPK	139.405.000
	2	Data dan Informasi Statistik Rutin yang dimanfaatkan	930.535.000
	3	Peningkatan kualitas data melalui Penguatan Sistem Pelaporan dan Statistik Rutin	2.708.125.000
	4	Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data dan informasi	538.500.000
	5	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	964.835.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 5.281.400.000**

Semarang, 12 Desember 2019

Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

M. Yani

Direktur Pelaporan dan Statistik,

Rudy Budiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyono
Jabatan : Direktur Advokasi, dan Komunikasi, Informasi, Edukasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Yani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

M. Yani

Pihak Pertama,

Sugiyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT ADVOKASI & KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapainya sasaran Program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas	1	Indeks pemahaman masyarakat tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	46.0 (Skala 0-100)
2	Meningkatkan akses dan kualitas penyelengaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi *(Unmet Need)*	8.6
3	Meningkatkan advokasi, KIE dan penggerakan program KKBPK	3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi *(Drop Out/DO)*	25.8
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya pengetahuan dan sikap masyarakat dalam program KKBPK	4	Indeks masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK	69.59 (skala 0-100)
		5	Jumlah Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program KKBPK yang Efektif	6 Tim Provinsi dan 35 Tim Kab/Kota
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	7	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	8	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	9	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Media	2.190.798.000
	2	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Mitra Kerja	11.082.340.000
	3	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Kegiatan Momentum	1.707.712.000
	4	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3.756.968.000
	5	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Lini Bawah	7.511.148.000
	6	Pengembangan Kebijakan dan Dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	5.259.754.000
	7	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga Lini Lapangan	1.325.276.000
	8	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	1.639.404.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 34.473.400.000**

Semarang, 12 Desember 2019

Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

M. Yani

Direktur Advokasi & Komunikasi, Informasi dan Edukasi,

Sugiyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermansyah
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Rizal Martua Damanik
Jabatan : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Muhammad Rizal Martua Damanik	**Hermansyah**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program KKBPK, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	1	Persentase SDM Aparatur yang kompeten	22
		2	Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik	70
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Tersedianya SDM Aparatur dan Tenaga Program KKBPK yang	3	Jumlah Tenaga Fasilitator Program KKBPK yang terlatih	148
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana	1	Pelaksanaan Pendidikan	572.049.000
	2	Pengembangan Kompetensi	3.851.762.000
	3	Standarisasi dan Sertifikasi	1.377.589.000
	4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	303.640.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 6.105.040.000**

Semarang, 12 Desember 2019

Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan

Muhammad Rizal Martua Damanik

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kependudukan dan KB,

Hermansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermansyah
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Rizal Martua Damanik
Jabatan : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Muhammad Rizal Martua Damanik

Pihak Pertama,

Hermansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PELATIHAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN DAN KB

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program KKBPK, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	1	Persentase Kerjasama Internasional KKBPK yang diimplementasikan	70
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan kerjasama international KKBPK dalam rangka penguatan peran BKKBN di Dunia Internasional	2	Jumlah peserta Pelatihan Internasional KKBPK yang berkualitas	30
		3	Jumlah Forum Internasional yang dihadiri oleh BKKBN	3
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	4	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	5	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	6	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Internasional Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	Pengembangan Kompetensi	4.013.014.000
	2	Penyusunan Laporan	1.244.249.000
	3	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	627.728.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 5.884.991.000**

Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan

Muhammad Rizal Martua Damanik

Semarang, 12 Desember 2019
Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama
Internasional Kependudukan dan KB,

Hermansyah

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrofa Hermiwahyoeni
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Rizal Martua Damanik
Jabatan : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Muhammad Rizal Martua Damanik	**Zahrofa Hermiwahyoeni**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program KKBPK, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	1	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program KKBPK	75
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan Kependudukan	2	Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	3.1 (Skala 1-4)
		3	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Kependudukan pada jurnal terakreditasi	1
		4	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	8
		5	Jumlah kerjasama penelitian Kependudukan dengan mitra	5
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	7	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	8	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	9	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	1	Pelaksanaan Penelitian	3.620.517.000
	2	Pelaksanaan Pengembangan	316.971.000
	3	Penerapan Hasil Litbang	321.837.000
	4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	502.886.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 4.762.211.000**

Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan

Muhammad Rizal Martua Damanik

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kependudukan,

Zahrofa Hermiwahyoeni

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrofa Hermiwahyoeni
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan Keluarga Sejahtera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Rizal Martua Damanik
Jabatan : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Muhammad Rizal Martua Damanik

Pihak Pertama,

Zahrofa Hermiwahyoeni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KB DAN KS

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program KKBPK, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	1	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program KKBPK	75
B.	**SASARAN KEGIATAN / PRIORITAS NASIONAL**			
1	Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2	Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3 (Skala 1-4)
		3	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada jurnal terakreditasi	4
		4	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	9
		5	Jumlah kerjasama penelitian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mitra	5
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	7	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	8	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	9	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1	Pelaksanaan Penelitian	2.100.859.809
	2	Pelaksanaan Pengembangan	219.580.000
	3	Penerapan Hasil Litbang	341.980.000
	4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	367.200.000
		TOTAL ANGGARAN	**Rp 3.029.619.809**

Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan

Muhammad Rizal Martua Damanik

Semarang, 12 Desember 2019
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan KB dan KS,

Zahrofa Hermiwahyoeni

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Agus Sapri
Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Sukiswo
Jabatan : Inspektur Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward d*an *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Agus Sukiswo

Pihak Pertama,

Endang Agus Sapri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT WILAYAH I

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapaianya pelaksanaan audit internal berbasis risiko yang berkualitas	1	Persentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran BKKBN	0.09
		2	Persentase materialitas temuan internal terhadap anggaran Satker	0.08
2	Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat yang efektif	3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3	Tercapainya ketersediaan data hasil pengawasan yang akurat	4	Persentase pelaporan hasil pengawasan tepat waktu	100
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100
4	Tercapainya Pemenuhan SDM Irtama yang Kompeten	6	Level kapabilitas APIP (IACM)	Level 3 (dengan 1 elemen level 4)
5	Tercapaianya *high-performance culture* berbasis merit	7	*Culture fit index*	3 (Level 1-4)
6	Terwujudnya pemanfaatan anggaran yang akuntabel	8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93
B.	**SASARAN KEGIATAN / PRIORITAS NASIONAL**			
1	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I	9	Persentase materialitas temuan Internal terhadap anggaran satker di wilayah I	0.08
		10	Persentase Unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor "70"	70
		11	Persentase unit kerja percontohan yang mendapat fasilitasi pembangunan ZI WBK di wilayah I	100
		12	Persentase Unit Kerja dengan nilai evaluasi SAKIP "B"	60
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	13	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	14	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	15	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	16	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN	KOMPONEN		ANGGARAN (Rp)
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah I	1	Pelaksanaan audit internal	1.286.362.000
	2	Pelaksanaan audit khusus	70.000.000
	3	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	251.111.000
	4	Pembinaan Pengawasan Kinerja dan	551.530.000
	5	Penyusunan Laporan	598.647.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 2.757.650.000**

Inspektur Utama,

Agus Sukiswo

Semarang, 12 Desember 2019
Plt. Inspektur Wilayah I,

Endang Agus Sapri

BkkbN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Agus Sapri
Jabatan : Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Sukiswo
Jabatan : Inspektur Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Agus Sukiswo

Pihak Pertama,

Endang Agus Sapri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT WILAYAH II

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapaianya pelaksanaan audit internal berbasis risiko yang berkualitas	1	Persentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran BKKBN	0.09
		2	Persentase materialitas temuan internal terhadap anggaran Satker	0.08
2	Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat yang efektif	3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3	Tercapainya ketersediaan data hasil pengawasan yang akurat	4	Persentase pelaporan hasil pengawasan tepat waktu	100
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100
4	Tercapainya Pemenuhan SDM Irtama yang Kompeten	6	Level kapabilitas APIP (IACM)	Level 3 (dengan 1 elemen level 4)
5	Tercapaianya *high-performance culture* berbasis merit	7	*Culture fit index*	3 (Level 1-4)
6	Terwujudnya pemanfaatan anggaran yang akuntabel	8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III	9	Persentase materialitas temuan Internal terhadap anggaran satker di wilayah II	0.08
		10	Persentase Unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor "70"	70
		11	Persentase unit kerja percontohan yang mendapat fasilitasi pembangunan ZI WBK di wilayah II	100
		12	Persentase Unit Kerja dengan nilai evaluasi SAKIP "B"	60
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	13	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	14	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	15	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	16	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN	KOMPONEN		ANGGARAN (Rp)
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah II	1	Pelaksanaan audit internal	1.150.240.000
	2	Pelaksanaan audit khusus	70.000.000
	3	Penyusunan kebijakan dan SOP	690.680.000
	4	Pembinaan Pengawasan Kinerja dan	513.280.000
	5	Penyusunan Laporan	427.800.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 2.852.000.000**

Inspektur Utama,

Agus Sukiswo

Semarang, 12 Desember 2019
Inspektur Wilayah II,

Endang Agus Sapri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hitima Wardhani
Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Sukiswo
Jabatan : Inspektur Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

Agus Sukiswo

Pihak Pertama,

Hitima Wardhani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT WILAYAH III

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**SASARAN PROGRAM**			
1	Tercapaianya pelaksanaan audit internal berbasis risiko yang berkualitas	1	Persentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran BKKBN	0.09
		2	Persentase materialitas temuan internal terhadap anggaran Satker	0.08
2	Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat yang efektif	3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3	Tercapainya ketersediaan data hasil pengawasan yang akurat	4	Persentase pelaporan hasil pengawasan tepat waktu	100
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100
4	Tercapainya Pemenuhan SDM Irtama yang Kompeten	6	Level kapabilitas APIP (IACM)	Level 3 (dengan 1 elemen level 4)
5	Tercapaianya *high-performance culture* berbasis merit	7	*Culture fit index*	3 (Level 1-4)
6	Terwujudnya pemanfaatan anggaran yang akuntabel	8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93
B.	**SASARAN KEGIATAN**			
1	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III	9	Persentase materialitas temuan Internal terhadap anggaran satker di wilayah III	0.08
		10	Persentase Unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor "70"	70
		11	Persentase unit kerja percontohan yang mendapat fasilitasi pembangunan ZI WBK di wilayah III	100
		12	Persentase Unit Kerja dengan nilai evaluasi SAKIP "B"	60
C.	**SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI**			
1	Meningkatnya pengelolaan BMN yang baik	13	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100
2	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	14	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
3	Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel	15	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	16	Nilai akuntabilitas (SAKIP)	71

KEGIATAN	KOMPONEN		ANGGARAN (Rp)
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah III	1	Pelaksanaan audit internal	1.087.694.000
	2	Pelaksanaan audit khusus	70.000.000
	3	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	668.222.000
	4	Pembinaan Pengawasan Kinerja dan	573.334.000
	5	Penyusunan Laporan	441.150.000
	TOTAL ANGGARAN		**Rp 2.840.400.000**

Semarang, 12 Desember 2019

Inspektur Utama,

Agus Sukiswo

Plt. Inspektur Wilayah III,

Hitima Wardhani